



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 20 September 2022
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyesuaian RKA K/L sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 (tiga puluh) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI C. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI D. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI E. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI F. Kepala Arsip Nasional RI G. Ketua Ombudsman RI

#### **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, hari Selasa, 20 September 2022, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2023 sebesar **Rp287.743.164.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebesar **Rp55.935.718.000,- (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp218.923.029.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN: Rp68.820.135.000,-
2. Menteri PAN&RB menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar **Rp192.232.272.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah)**.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 sebesar **Rp608.372.344.000,- (enam ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp548.847.345.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN: Rp59.524.999.000,-
4. Kepala BKN menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan BKN sebesar **Rp29.582.603.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

5. Kepala Lembaga Administrasi Negara menyampaikan Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2023 sebesar **Rp323.162.174.000,-** (*tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) LAN Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp261.093.124.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN: Rp62.069.050.000,-
  
6. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2023 sebesar **Rp286.634.533.000,-** (*dua ratus delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ANRI Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp218.179.381.000,-
  - b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional: Rp68.455.152.000,-
  
7. Kepala ANRI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan ANRI sebesar **Rp75.009.470.000,-** (*tujuh puluh lima milyar sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  
8. Ketua Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2023 sebesar **Rp248.327.920.000,-** (*dua ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ORI Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp208.321.712.000,-
  - b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Rp40.006.208.000,-
  
9. Ketua ORI menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan ORI sebesar **Rp21.011.150.000,-** (*dua puluh satu milyar sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

### III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Kepala Lembaga Administrasi Negara RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara RI, Kepala Arsip Nasional RI, dan Ketua Ombudsman RI, dengan agenda penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2023 sebesar **Rp287.743.164.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebesar **Rp55.935.718.000,- (lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp218.923.029.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN: Rp68.820.135.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar **Rp192.232.272.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)** dan usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2023 sebesar **Rp608.372.344.000,- (enam ratus delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp548.847.345.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN: Rp59.524.999.000,-
4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BKN sebesar **Rp29.582.603.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
5. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2023 sebesar **Rp323.162.174.000,- (tiga ratus dua puluh tiga milyar seratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) LAN Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen: Rp261.093.124.000,-

- b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN:  
Rp62.069.050.000,-
6. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2023 sebesar **Rp286.634.533.000,-** (*dua ratus delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ANRI Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen: Rp218.179.381.000,-
  - b. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional: Rp68.455.152.000,-
7. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan ANRI sebesar **Rp75.009.470.000,-** (*tujuh puluh lima milyar sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ANRI tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
8. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tahun 2023 sebesar **Rp248.327.920.000,-** (*dua ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*), untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ORI Tahun 2023, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
- a. Program Dukungan Manajemen: Rp208.321.712.000,-
  - b. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Rp40.006.208.000,-
9. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan ORI sebesar **Rp21.011.150.000,-** (*dua puluh satu milyar sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah*), dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) ORI tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.28 WIB.

Jakarta, 20 September 2022

KETUA RAPAT



Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.

A-462